

Pekan Kebudayaan Aceh Dalam Perspektif Historis

Septian Fatianda

Pusat Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam di Aceh dan Alam Melayu (PUSAKA) Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia
Email: septianfatianda@gmail.com

Nuraini A. Manan

Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: nuraini.manan@ar-raniry.ac.id

Muhammad Yunus Ahmad

Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: m.yunus@ar-raniry.ac.id

Abstract

This article is entitled Pekan Kebudayaan Aceh (Aceh Cultural Week) in Historical Perspective. Aceh Cultural Week or PKA is a cultural event displaying cultural richness through cultural attractions, artistic performances, exhibitions and cultural seminars. The purpose of this research is to find out the early history of PKA implementation and its development, impact, shifting in the initial PKA values and objectives, as well as criticism and input on the implementation of PKA. This study uses the historical method through heuristic steps, interviews, source criticism, interpretation, and historiography or history writing. The results of this study explain that the Aceh Cultural Week has been implemented for seven times where firstly held was in 1958 and continued until the latest (seventh) PKA in 2018. This PKA is aimed to develop and preserve Aceh's historical, traditional and cultural values and as a means of unifying various ethnic groups in Aceh. In addition, PKA has provided substantial results for the preservation of Aceh's culture. Furthermore, this research also explains that the society highly appreciates the implementation of PKA despite some points that need to be evaluated in order to achieve the noble ideals of PKA itself.

Keywords: Aceh Cultural Week (PKA); historical perspective; cultural event

Abstrak

Tulisan ini berjudul Pekan Kebudayaan Aceh Dalam Perspektif Historis. Pekan Kebudayaan Aceh atau PKA merupakan sebuah kegiatan yang berbentuk festival kebudayaan dengan menampilkan kekayaan budaya di Aceh berupa atraksi budaya, penampilan kesenian, pameran, dan seminar kebudayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah awal penyelenggaraan PKA dan perkembangannya dari masa ke masa, manfaat yang dihasilkan, pergeseran nilai dan tujuan awal PKA, serta kritik dan masukan terhadap penyelenggaraan PKA. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yaitu melalui langkah-langkah heuristik, wawancara, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi atau penulisan sejarah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pekan kebudayaan Aceh telah berlangsung selama tujuh kali penyelenggaraan dimana yang pertama kali diselenggarakan tahun 1958 dan terus berlanjut hingga yang terakhir PKA tujuh tahun 2018. PKA

ini memiliki tujuan untuk pengembangan dan pelestarian nilai-nilai sejarah, adat, dan budaya Aceh serta sebagai sarana pemersatu dari berbagai etnis yang ada di Aceh. Selain itu PKA telah memberikan hasil yang cukup besar bagi pelestarian budaya Aceh. Selanjutnya penelitian ini juga menjelaskan bahwa masyarakat sangat mengapresiasi penyelenggaraan PKA namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi guna mencapai cita-cita mulia dari PKA itu sendiri.

Kata Kunci: *Pekan Kebudayaan Aceh (PKA); perspektif historis; festival kebudayaan*

Pendahuluan

Aceh merupakan sebuah provinsi yang terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Provinsi Aceh memiliki luas wilayah sekitar 53.400 km² dan ibukota terletak di Banda Aceh. Provinsi Aceh memiliki Kabupaten/kota yang berjumlah 23 dimulai dari Sabang hingga Aceh Singkil. Aceh dikenal sebagai masyarakat yang berbudaya, hal ini tercermin dalam ungkapan *matee aneuk meupat jeurat, gadoh adat pat tamita*. Ungkapan ini merupakan suatu pernyataan yang mempunyai nilai-nilai filosofis yang perlu direnungkan. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari (Ismail 2012). Adat istiadat masyarakat Aceh merupakan bagian dari sisi budaya yang hidup dan berkembang di Aceh.

Aceh merupakan wilayah yang memiliki keberagaman suku etnik yang tersebar di seluruh 23 kabupaten/kota. Beberapa suku-suku tersebut adalah suku Aceh, Gayo, Alas, Aneuk Jamee,

Singkil, Kluet, Tamiang, dan berbagai suku yang mendiami pulau Simeuleu. Keberagaman unsur kebudayaan ini telah menjadikan Aceh sebagai daerah yang kaya akan nilai-nilai budaya. Setiap suku di Aceh memiliki kekhasan adat dan budaya mereka sendiri seperti dalam hal bahasa, seni tutur, tradisi, seni musik, seni tari, dan banyak hal lainnya. Kekayaan akan nilai budaya ini menjadikan Aceh sebagai suatu daerah dengan masyarakat sangat menjunjung tinggi kehidupan yang majemuk.

Dalam perkembangannya kebudayaan Aceh banyak menghadapi beberapa permasalahan sehingga membuat kebudayaan Aceh menjadi susah untuk berkembang, penyebabnya antara lain bahwa Aceh merupakan daerah yang sering bergejolak dengan konflik dimulai dari peperangan melawan Portugis tahun 1577-1629 M, perang melawan Belanda 1873-1912 M, perang melawan Jepang 1942-1945, dan konflik Aceh pada masa DI/TII di bawah komando Teungku (Ahmad 2008). Daud Bereueh, yang menjadikan Aceh menjadi

daerah yang tidak aman sehingga semangat membangun kebudayaan Aceh juga terhenti.

Menghadapi permasalahan tersebut untuk memulihkan kembali kondisi politik Aceh yang tidak kondusif dengan keamanan yang tidak stabil. Serta untuk tetap menjaga khazanah kebudayaan Aceh yang kaya, ditambah dengan maraknya kebudayaan Barat yang berpotensi akan mengancam kelestarian kebudayaan Aceh maka digagaslah Pekan Kebudayaan Aceh (PKA). Semangatnya bahwa Aceh harus dipersatukan dan seluruh hasil kebudayaan Aceh perlu dihadirkan dalam suatu wadah dengan maksud agar adat dan budaya Aceh tetap terjaga dan semakin berkembang. Faktor inilah yang mendorong terselenggaranya Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) yang pertama pada tahun 1958.

Setelah kesuksesan PKA pertama butuh waktu yang sangat lama untuk menyelenggarakan kembali PKA edisi kedua yaitu pada tahun 1972, begitu pula dengan penyelenggaraan PKA edisi ketiga yang membutuhkan waktu yang cukup lama juga yaitu tahun 1988. Selanjutnya PKA edisi keempat hingga ketujuh berturut-turut pada tahun 2004, 2009, 2013, dan 2018. Dalam setiap penyelenggaraannya PKA baik dari yang

pertama hingga ketujuh, semua menyimpan sejarah tersendiri dengan hasil yang dicapai dalam perkembangan kebudayaan Aceh. Selain keberhasilan dalam setiap penyelenggaraan PKA juga terdapat kekurangan dan kritikan dari masyarakat

Latar Belakang Lahirnya Pekan Kebudayaan Aceh

PKA untuk pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 1958. Ketika itu ide penyelenggaraan ini didasarkan pada kesadaran tokoh-tokoh Aceh saat itu akan pentingnya menyelesaikan suatu hal dengan melalui pendekatan kebudayaan. Sejarah mencatat bahwa yang ada tiga pejabat yang menjadi trio lahirnya pesta kebudayaan ini. Trio itu adalah Gubernur Aceh Ali Hasjmy, ketua penguasa Perang/Panglima Komando Daerah Militer Aceh Letnan Kolonel Syamaun Gaharu, dan Kepala Staf KDMA Mayor T. Hamzah Bendahara.

Satu hal yang menjadi dasar pemikiran lahirnya PKA adalah ketika Nyak Yusda terinspirasi dari daerah lain di Indonesia saat itu yang memiliki festival kebudayaannya sendiri seperti yang pernah dibuat di Sumatra Barat yaitu Pekan Kebudayaan Minangkabau. Begitu juga di tingkat nasional dimana

diselenggarakan Festival Kebudayaan Nasional. Ide dan inspirasi tersebut lalu disampaikan oleh Nyak Yusda kepada para sahabatnya yang berlokasi di SMEA Kutaraja. Seusai berdiskusi dan telah mendapatkan beberapa bahan dan ide maka Nyak Yusda menyampaikan perihal ide penyelenggaraan PKA ini kepada Kepala Staf Penguasa Perang Daerah/KDMA, Mayor T. Hamzah. Ide tersebut mendapat tanggapan yang sangat positif. Selanjutnya mereka menjumpai Gubernur Aly Hasjmy dan juga mendapat sambutan yang sangat positif (Tim Perumus Laporan PKA-3 1991).

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan kuat mengapa ide penyelenggaraan PKA ini cepat terealisasi. *Pertama* sejak pertengahan tahun 1950-an atau kurang lebih tiga tahun berlangsungnya peristiwa DI/TII telah timbul upaya untuk mewujudkan keamanan dan pembangunan kembali Daerah Aceh (Ibrahimy 1982). Berbagai usaha pemulihan tersebut dilakukan dengan baik oleh pihak Pemerintah Daerah dan masyarakat Aceh serta para pemuda dan masyarakat Aceh yang berada di luar Aceh. Salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat Aceh yang sedang berada di luar Aceh ialah dengan

mengadakan beberapa pertemuan diantara mereka.

Seperti pada masyarakat dan mahasiswa Aceh di Bandung yang tergabung dalam IPS (Ikatan Pemuda Seulawah), mereka mengadakan kongres Pelajar/Mahasiswa Aceh pada tahun 1956 dibawah pimpinan AK. Yacoby. Pada tahun sama di Jakarta dilakukan pula Kongres Kilat Masyarakat Aceh yang dipimpin oleh Nyak Yusda, demikian pula pada tahun 1957 diadakan Kongres Masyarakat Aceh di Medan dibawah pimpinan Nur Nekmat dan Said Ibrahim Dari semua bentuk pertemuan yang dilakukan masyarakat Aceh tersebut memiliki satu kesamaan hasil yaitu memberikan andil berupa pokok-pokok pikiran dan saran-saran guna untuk pemulihan keamanan dan membangun kembali Daerah Aceh.

Kedua, pada masa-masa itu di tanah air sedang berkembang upaya untuk memperkaya kebudayaan nasional melalui pengembangan kebudayaan asli daerah, dimana di beberapa daerah di tanah air sudah mengadakan berbagai kegiatan-kegiatan kebudayaan, diantaranya di Sumatera Barat pada tahun 1957, walaupun saat itu suasana politiknya sedang panas, bahkan juga kebudayaan sering

dipergunakan sebagai alat politik oleh beberapa elit politik.

Ketiga, motivasi yang ditimbulkan oleh kenyataan sejarah Aceh di masa lampau bahwa Aceh merupakan daerah yang kaya akan nilai-nilai tradisi adat dan budaya, tradisi ini telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Aceh ke setiap generasi setelahnya. Sehingga ketika muncul ide untuk melaksanakan PKA itu dengan cepat dan mudah menjalar serta disambut hangat oleh segenap lapisan masyarakat di seluruh Aceh.

Keempat, fakta bahwa para pejabat yang memegang kekuasaan di Aceh dan para tokoh masyarakat menaruh minat dan perhatian yang besar dan serius kepada bidang kebudayaan di Aceh. Terutama bagi trio ini Ali Hasjmy, Syamaun gaharu, dan T. Hamzah Bendahara mereka telah mengusahakan segala upaya untuk membuat satu kegiatan dengan harapan bisa menjadi wadah untuk menghidupkan dan melestarikan kebudayaan di Aceh (Tim Perumus Laporan PKA-3 1991).

Penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh dari Masa ke Masa

Pekan Kebudayaan Aceh Pertama

Pekan Kebudayaan Aceh Pertama atau PKA-1 dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1958 dan ditutup pada tanggal 23 Agustus 1958. Kegiatan PKA-1 ini bertempat di Gedung Balai Teuku Umar (BTU) Kutaraja. Setahun sebelum pelaksanaannya, pada tahun 1957 telah dibentuk Lembaga Kebudayaan Aceh (LKA) yang diketuai oleh T. Hamzah Bendahara. Lembaga inilah yang berperan besar dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan PKA-1 ini (Djamil 1959). Untuk menyemarakkan kegiatan, tema yang diangkat pada PKA-1 ini adalah "*Adat Bak Poteumeurehom, Hukum Bak Syiah Kuala*". Tujuan utama yang ingin dicapai pada PKA-1 ini adalah agar melalui kegiatan ini masyarakat Aceh mampu bangkit dan bersatu guna untuk menata kembali kehidupan masa depan masyarakat Aceh yang sempat suram akibat perang yang berkepanjangan melalui pendekatan kebudayaan.

Penyelenggaraan PKA-1 ini juga telah berkontribusi dalam melahirkan beberapa hasil bagi kemajuan Aceh diantaranya revitalisasi kebudayaan Aceh dimana melalui PKA ini mulai muncul semangat untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kebudayaan Aceh yang telah sempat memudar. Kemudian PKA-1 juga melahirkan sebuah Piagam

yang bernama *"Adat Bak Po Teumeureuhom Hukom Bak Syiah Kuala"* yang merupakan sebuah bentuk kesepakatan dan komitmen bersama para tokoh dan masyarakat Aceh untuk membangun serta menghidupkan kembali adat-istiadat dan kebudayaan Aceh dalam setiap gerak pembangunan Aceh dan masyarakatnya. Selanjutnya hasil yang cukup fenomenal ialah terwujudnya pembangunan Komplek Pelajar Mahasiswa (KOPELMA) Darussalam yang merupakan pusat pendidikan untuk mendidik generasi untuk siap membangun Aceh kedepan. Selanjutnya dari Kopelma lahir tiga kampus yaitu Universitas Syiah Kuala, IAIN Ar-Raniry (sekarang menjadi UIN), dan Kampus Tgk. Chik Pante Kulu.

Pekan Kebudayaan Aceh Kedua

Pekan Kebudayaan Aceh Kedua atau PKA-2 dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus hingga 2 September 1972 yang berpusat di Lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh. Gagasan untuk penyelenggaraan PKA-2 sesungguhnya telah dimulai sejak selesainya PKA-1. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu gagasan ini sering terhambat karena peristiwa peralihan Orde Lama ke masa Orde Baru serta pemberontakan G-30-S PKI dan

penumpasan PKI yang berdampak besar terhadap situasi politik dan keamanan di Aceh (Latief 2000). Sebelas tahun kemudian tepatnya pada tahun 1969 gagasan ini pernah dicetuskan kembali oleh Brigjen T. Hamzah Bendahara dalam suatu pertemuan dengan pengurus LPSB (Lembaga Pembina Seni Budaya) Daerah Aceh. Dengan berbagai usaha yang telah dilakukan barulah pada tahun 1972 PKA-2 dapat diwujudkan.

PKA-2 ini diselenggarakan pada masa pemerintahan Gubernur Muzakir Walad. Penyelenggaraan PKA-2 ini sebagai upaya memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, militer, hankam, dan agama (Ipoleksosbutmilag). Selain itu PKA ini juga sebagai upaya untuk membuka Aceh dari isolasi yang telah berjalan lama khususnya dalam bidang prasarana fisik, ekonomi, dan sosial budaya (Putra 2018). Muzakir Walad memiliki perhatian khusus dalam hal pembangunan Aceh sehingga tema yang diangkat pada PKA-2 ini adalah *"Kebudayaan Dalam Rangka Pembangunan"*.

Penyelenggaraan PKA-2 memiliki konsep dan rangkaian kegiatan yang berbeda dari sebelumnya dimana PKA

edisi kedua ini memiliki banyak item kegiatan kebudayaan berupa pawai kebudayaan, pagelaran adat dan budaya, pameran benda budaya, pementasan seni, permainan kerakyatan, seminar kebudayaan, dan lain sebagainya. Hasil yang cukup jelas tampak pasca pelaksanaan PKA-2 ini adalah terbukanya isolasi Aceh dari dunia luar sehingga setelahnya banyak para wisatawan yang datang ke Aceh hingga hal ini berdampak pada sektor ekonomi dan pembangunan Aceh. PKA-2 juga berhasil menghimpun dan menampilkan kembali banyak nilai-nilai budaya Aceh terutama kesenian-kesenian asli Aceh.

Pekan Kebudayaan Aceh Ketiga

PKA-3 dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus hingga 05 September 1988 yang bertempat di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Pelaksanaan pada tahun 1988 menunjukkan bahwa butuh waktu selama 16 tahun bagi Aceh untuk melaksanakan kembali kegiatan pengembangan kebudayaan melalui PKA. Hal ini cukup beralasan dimana pada tahun 1976 di Aceh telah muncul Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di bawah pimpinan Hasan Tiro yang menuntut Aceh untuk pisah dari NKRI. Faktor ini telah membuat situasi sosial, politik,

keamanan Aceh menjadi terganggu hingga berdampak pada rencana penyelenggaraan PKA edisi ketiga ini. Akhirnya pada tahun 1985 dan 1986 sudah terbentuk Dewan Kesenian Aceh (DKA) dan Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) sehingga dengan adanya lembaga tersebut keinginan untuk merealisasikan PKA menjadi semakin kuat dan terorganisir. Ide PKA-3 ini juga didukung kuat oleh Gubernur Aceh saat itu Ibrahim Hasan yang baru saja dilantik pada bulan september 1987. Keinginan untuk membangun Aceh melalui PKA akhirnya terwujud.

Pada PKA 1988 ini diketuai oleh Wakil Gubernur Aceh saat itu Teuku Djohan. Penyelenggaraan PKA-3 ini digelar dengan tujuan utama untuk menguatkan kembali nilai-nilai agama, tradisi, ideologi, ekonomi, keamanan, dan sosial budaya masyarakat Aceh. PKA-3 ini juga sebagai usaha untuk membuka kembali isolasi Aceh yang telah dianggap tidak aman dikunjungi karena meletusnya pemberontakan GAM tersebut. Usaha ini terbilang efektif yaitu dengan penyelenggaraan PKA-3 yang cukup meriah dengan banyaknya partisipasi masyarakat Aceh bahkan dari daerah luar Aceh dalam menyemarakkan agenda ini.

Perhelatan PKA edisi ketiga memiliki konsep yang sudah berkembang bergerak maju dari PKA sebelumnya, pada perhelatan ini diisi dengan kegiatan pawai kebudayaan, pameran kebudayaan dan pembangunan, permainan rakyat, seminar dan temu budaya daerah. Pertunjukan kesenian yang ditampilkan sebanyak 125 macam kesenian Aceh terutama tari-tari tradisi, seni sastra, musik, dan seni tari. Dalam PKA-3 ini turut dilaksanakan Mubes Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) dan pertemuan sastrawan Aceh.

Pekan Kebudayaan Aceh Keempat

Pada tahun 2000 Pemerintah Provinsi Aceh telah membentuk Dinas Kebudayaan yang tertuang SK Nomor 22 Tahun 2002 guna untuk mengemban tugas dan fungsi utama membangun dan mengembangkan sektor kebudayaan di Aceh. Berdasarkan keputusan tersebut maka Dinas Kebudayaan diberikan mandat untuk merencanakan dan memprogramkan kegiatan pengembangan kebudayaan melalui acara Pekan Kebudayaan Aceh. Dengan alasan tersebut maka pelaksanaan PKA-4 ini menjadi PKA pertama yang menjadi tanggung jawab penuh Dinas

Kebudayaan dalam hal pelaksanaannya (Tim perumus laporan DISBUDPAR Aceh 2004). Selain itu PKA-4 ini juga untuk pertama kalinya Pemerintah melibatkan pihak Event Organizer (EO) untuk menyiapkan sekaligus sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Pada PKA-4 ini yang menjadi Ketua umum pelaksanaannya adalah Thantawi Ishak dan dilaksanakan pada masa pemerintahan Gubernur H. Abdullah Puteh.

Pekan Kebudayaan Aceh keempat atau PKA-4 dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 28 Agustus 2004 bertempat di Taman Sultanah Safiatuddin. Butuh jarak waktu selama 16 tahun untuk kembali menyelenggarakan PKA-4 ini. Jaraknya rentang waktu ini disebabkan karena situasi sosial politik dan keamanan Aceh yang tidak stabil oleh peristiwa pemberontakan GAM dan kebijakan pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada tahun 2003. Atas alasan tersebut penyelenggaraan PKA dianggap perlu untuk kembali digelar sebagai upaya untuk mencapai perdamaian di Aceh seperti yang tertulis pada tema PKA-4 ini *"Mantapkan Jati Diri, Jalin Silaturahmi, Wujudkan Perdamaian"*.

PKA-4 memiliki konsep pembukaan yang cukup meriah dan

dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya diisi dengan kegiatan pawai kebudayaan, pameran kebudayaan dan benda sejarah, khanduri masal, pasar rakyat, pagelaran seni, lomba permainan rakyat, seminar kebudayaan, dan yang terbaru di PKA yaitu pemberian Anugerah Budaya kepada para masyarakat yang berjasa melestarikan kebudayaan di Aceh. Satu hal yang menjadi keberhasilan besar PKA-4 ini adalah selesai dibangunnya komplek kawasan seni dan kebudayaan Aceh yang terdiri dari Anjungan 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Kawasan ini diberi nama Taman Sulthanah Safiatuddin dengan alasan karena pada masa Safiatuddin memimpin Kerajaan Aceh Darussalam selama 35 tahun dianggap kebudayaan Aceh sangat maju. Ide pendirian Taman Safiatuddin ini sebelumnya sudah direncanakan pada masa kepemimpinan Gubernur Aceh H. Muzakir Walad, Namun baru bisa diwujudkan pada masa Gubernur Aceh Abdullah Puteh, yang juga turut dipelopori oleh Marlinda Abdullah Puteh (Isteri Gubernur Aceh) yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, dengan tujuan sebagai suatu bagian membangun kembali khazanah warisan

Aceh dan bagian dari pemersatu Aceh melalui adat dan budaya (Putra 2018).

Pekan Kebudayaan Aceh Kelima

Setelah sukses menyelenggarakan PKA-4 dengan segala hasil dan manfaatnya bagi kebudayaan Aceh, diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dibidang Agama, Pendidikan, dan Adat Istiadat. Maka Pemerintah Aceh dalam hal ini melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh kembali memprogramkan sebuah kegiatan pelestarian dan aktualisasi Adat dan Budaya Daerah melalui PKA-5. Untuk suksesnya PKA ini Pemerintah Aceh dengan Gubernur Irwandi Yusuf membentuk panitia PKA-5 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur No. 430/06/2009. Keputusan ini menetapkan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar sebagai Ketua Umum PKA-5 dan Sekretaris Umum dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (Tim Perumus Laporan PKA DISBUDPAR Aceh 2009).

Penyelenggaraan PKA edisi kelima ini terbilang istimewa karena menjadi sebuah bentuk rasa syukur Pemerintah dan masyarakat Aceh atas bangkitnya Aceh dari musibah besar bencana tsunami pada tahun 2004 lalu

dan sebagai sebuah perayaan atas terjalannya nota kesepahaman perdamaian antara Aceh dengan Republik Indonesia dalam MoU Helsinki tahun 2005. Oleh sebab itu panitia mengangkat tema *Satukan Langkah, Bangun Aceh Dengan Tamaddun* dengan maksud antara lain untuk meningkatkan peran serta dan apresiasi masyarakat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai budaya Aceh yang Islami, melestarikan keragaman budaya dalam memperkokoh kedamaian yang abadi di Aceh, serta meningkatkan peran serta masyarakat sekaligus mempromosikan adat dan produk budaya maupun pariwisata Aceh.

PKA-5 digelar pada tanggal 2 sampai dengan 11 Agustus 2009 di Taman Sultanah Safiatuddin dan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 5 Agustus 2009 di Stadion H. Dimurtala Lampineung Banda Aceh. Dalam sambutannya SBY mengatakan bahwa pasca perdamaian Pemerintah berkomitmen untuk membangun Aceh melalui rehabilitasi dan rekonstruksi. Aceh harus dibangun dengan nuansa yang lebih modern namun tetap tidak menghilangkan nilai-nilai budayannya. Berbagai kegiatan menarik berupa

pawai, pameran warisan budaya, seminar kebudayaan, gebyar dan aneka lomba kesenian, permainan rakyat, anugerah budaya, pasar rakyat, serta promosi wisata telah menyemarakkan kegiatan PKA-5 ini.

Pekan Kebudayaan Aceh Keenam

Pekan Kebudayaan Aceh ke-6 atau PKA-6 diselenggarakan pada tanggal 20 hingga 29 September 2013 yang bertempat di Taman Sulthanah Safiatuddin. PKA-6 dibuka secara resmi oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Terselenggaranya PKA pada tahun 2013 ini sebagai buah dari komitmen Pemerintah Aceh di PKA-5 untuk menyelenggarakan PKA dalam kurun waktu lima tahun sekali. Untuk suksesnya pelaksanaan PKA-6 ini, Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui SK Gubernur No. 430/247/2013 membentuk panitia PKA-6 yang diketuai oleh Wakil Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf dan Sekretaris Umum Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Tim Penyusun Laporan PKA 2013). Kegiatan PKA ini mengusung tema "*Aceh Satu Bersama*" memiliki filosofis dan maksud bahwa diharapkan PKA-6 mampu menjadi wadah bagi masyarakat Aceh untuk bersatu sehingga bisa bersama-

sama membangun Aceh melalui kebudayaan.

Penyelenggaraan PKA-6 secara umum ingin membentuk kepribadian masyarakat Aceh yang lebih berbudaya, juga untuk menumbuhkan pemahaman, pengamatan, dan pelestarian nilai budaya daerah yang lebih luhur dan beradab untuk mengangkat harkat dan martabat manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai agama. Selain itu, PKA keenam dijadikan ajang mempromosikan adat budaya, produk budaya serta pariwisata Aceh sehingga menjadi perekat keragaman budaya bagi masyarakat Aceh. Kegiatan PKA 2013 ini telah menjadi sarana pemersatu dan hiburan bagi masyarakat Aceh. Secara konsep kegiatan PKA-6 terlihat hampir sama dengan PKA sebelumnya yaitu kegiatan pawai budaya, pameran benda bersejarah, pagelaran adat istiadat, gebyar seni, perlombaan permainan rakyat, seminar kebudayaan, pasar rakyat, dan juga anugerah budaya.

Pekan Kebudayaan Aceh Ketujuh

Setelah kesuksesan penyelenggaraan PKA-6 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh kembali bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan event lima tahunan

tersebut. Pemerintah Aceh mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Np. 430/228/2018 tanggal 12 Maret 2018 membentuk panitia pelaksana PKA edisi ketujuh (PKA-7). Kemudian diperbaiki dengan SK Gubernur No. 430/716/2018 dengan Ketua Umum PKA yaitu Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Sekretaris Umum dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, dan dengan personalia dari Instansi terkait (Tim Penyusun Laporan PKA-7 2018).

PKA-7 dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 15 Agustus 2018 dengan tema "*Aceh Hebat dengan Adat Budaya Bersyariat*". Tema ini dipilih karena dianggap lebih tegas karena menginginkan Aceh menjadi hebat dengan implementasi adat dan budaya yang berlandaskan syariat Islam. Pembukaan PKA-7 bertempat di Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya dan dibuka secara resmi oleh Muhadjir Effendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mewakili Presiden. Acara ini merupakan pembukaan PKA paling meriah dari edisi-edisi sebelumnya. Alasannya antara lain, pada pembukaan yang melibatkan dua ribu lebih talent dan menghadirkan 30 ribu lebih undangan dari dalam dan luar negeri. Kemudian juga menampilkan Tari Kolosal

bertemakan *Aceh Lhee Sagoe* dan pemutaran *video mapping* kebudayaan Aceh.

Secara konsep dan pelaksanaan PKA tahun 2018 ini memiliki serangkaian kegiatan yang lebih banyak dari sebelumnya dan dikemas kedalam persembahan yang sangat kekinian. Rangkaian kegiatan PKA-7 ini antara lain dimulai dari pembukaan, pawai budaya, pameran sejarah dan benda budaya, Aceh expo, pasar rakyat, pameran bisnis pariwisata, pameran kuliner Aceh, pagelaran prosesi adat, permainan rakyat, pagelaran seni tradisi, seminar kebudayaan dan kemaritiman, dan berbagai kegiatan kebudayaan lainnya. Dengan banyak item kegiatan tersebut telah mengundang partisipasi masyarakat baik dari dalam maupun luar Aceh yang cukup besar untuk berhadir sehingga menumbuhkan geliat ekonomi masyarakat yang sangat pesat bahkan dalam sehari perputaran uang mencapai Rp 10 Milyar.

Ada beberapa inovasi baru yang ditambahkan pada PKA edisi ini diantaranya untuk pertama kali diciptakan maskot PKA-7 yang diberi nama Pomeurah Meusedati, yang menggambarkan gajah putih yang sedang memperagakan gerakan tari

seudati dengan ekspresi gembira. Atribut yang dipakainya yaitu Kupiah Meukutob dibagian kepala dan Songket Aceh di Pinggangnya. Maskot ini diciptakan sebagai terobosan untuk meningkatkan media promosi PKA-7. Kemudian hal yang baru lagi adalah pada PKA-7 menggunakan tempat pelaksanaan sebanyak 18 tempat di kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Pergeseran Nilai dan Tujuan Dasar Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh

Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) merupakan kegiatan yang memiliki daya tarik tinggi bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan hiburan positif. PKA memiliki sejarah yang cukup panjang dalam hal dinamika pelaksanaannya dimana ia telah dilaksanakan pertama sejak tahun 1958. Pada PKA-1 yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1958 ini secara mendasar memiliki tujuan sebagai media pemersatu Aceh dari gejolak konflik yang sudah berkepanjangan, dan juga sebagai pemersatu kebudayaan dan etnik yang beragam di Aceh. Kemudian PKA-2 yang diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kegairahan dan apresiasi masyarakat Aceh terhadap kebudayaan asli mereka, meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata, dan

untuk memelihara seluruh nilai kekayaan adat dan budaya Aceh.

Begitu juga dengan PKA-3 yang diselenggarakan sebagai upaya untuk menggali dan menghidupkan kembali seni budaya tradisional Aceh yang bernilai positif bagi pembangunan dan pembentukan kepribadian masyarakat Aceh serta sebagai ajang penambahan pendapatan ekonomi masyarakat melalui daya tarik wisata. Secara umum PKA edisi pertama hingga ketiga memiliki tujuan dan semangat yang hampir sama yaitu sebagai ajang pemersatu, pemeliharaan budaya, serta sebagai sarana pembangunan fisik maupun non fisik bagi Aceh. Perhelatan PKA Pertama hingga Ketiga ini telah menjadi obat penghibur bagi masyarakat Aceh yang rindu akan tampilan-tampilan kebudayaan.

Selang belasan tahun kemudian tepatnya pada 2004 akhirnya PKA edisi keempat kembali digelar. Kehadiran PKA-4 dirancang untuk memperbaiki segala kekurangan dan keterbatasan tiga PKA edisi sebelumnya. Maka untuk kali pertama PKA dimandatkan kepada DISBUDPAR Provinsi Aceh serta manajemen pelaksanaan yang dipegang oleh tim Event Organizer. Harapan masyarakat untuk mendapatkan tontonan yang menghibur dan bernilai

edukasi pada PKA-4 ini perlahan mulai berkurang. Hal ini disebabkan oleh tarik ulur tugas dan manajemen pelaksanaan yang tidak lagi sistematis. Berlanjut pada perhelatan PKA-5 tahun 2009 yang diselenggarakan sebagai bentuk syukur atas perdamaian Aceh dan juga sebagai pengembangan kekayaan kebudayaan Aceh. Pelaksanaan PKA-5 dipegang oleh EO yaitu PT. Dimeta Internusa, namun akibat persiapan dan manajemen yang kurang baik tujuan awal PKA ini mulai bergeser dimana pada PKA-5 porsi yang diberikan pada seni dan tradisi Aceh mulai berkurang disebabkan dengan banyaknya muncul seni kreasi baru yang lebih dinikmati masyarakat sehingga seni tradisi ini menjadi kurang diminati dan terlupakan.

Kemudian pada gelaran PKA-6 secara tujuan memiliki kesamaan dengan edisi keempat dan kelima yaitu untuk meningkatkan hasrat masyarakat agar terus menggali serta mengembangkan seni budaya Aceh dan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kepribadian masyarakat Aceh. Dari segi persiapan dan tata kelola pelaksanaan juga hampir sama dengan dua edisi PKA sebelumnya. Namun yang patut disayangkan kehadiran masyarakat pada PKA-6 lebih banyak untuk menghibur diri dan sambil

bermain-main dengan keluarga dan kerabat, tapi sangat minim masyarakat yang hadir untuk memperoleh edukasi guna mengetahui nilai-nilai adat dan budaya Aceh.

Pada tahun 2018 Aceh kembali menyelenggarakan kegiatan PKA edisi ketujuh dan dana yang dialokasikan untuk PKA ini cukup besar sehingga membuat PKA-7 ini secara konsep dan kemasan terlihat cukup mewah. Namun ada hal yang sangat disayangkan pada PKA-7 ini dimana seluruh item kegiatannya dipegang kendali pelaksanaannya oleh para EO. Kebijakan ini memiliki dampak positif namun juga banyak dampak negatifnya diantaranya kualitas dan keseriusan sebuah kegiatan di PKA ini menjadi berkurang bahkan juga terkesan kegiatan yang dilaksanakan sekedarnya saja sehingga memudahkan nilai dan substansi dari kegiatan kebudayaan itu. Rangkaian kegiatan yang cukup banyak telah membuat pengunjung membludak untuk berhadir. Kehadiran mereka dominan untuk keperluan cuci mata, bermain, dan belanja di pasar yang memang dibuat khusus. Pasar ini sangat banyak menarik minat masyarakat sehingga muncul stigma negatif yang menyebutkan bahwa PKA-7 selayaknya sebagai sebuah kegiatan Pasar Malam.

Hal ini sangat jauh bertolak belakang dengan cita-cita dan tujuan awal dilaksanakan PKA yaitu untuk mempersatukan Aceh dan melestarikan khazanah kebudayaannya, serta sebagai media untuk peningkatan kualitas kepribadian masyarakat. Pergeseran ini disebabkan banyak hal mulai dari perkembangan zaman yang membuat budaya Aceh kurang diminati dan juga karena yang menjadi pihak pelaksana PKA hanya berorientasi pada ekonomi sehingga PKA dijadikan sebagai sebuah proyek untuk dimanfaatkan kepentingan pribadi atau kelompok, bukannya digarap secara serius untuk membangun kebudayaan Aceh.

Harapan dan Masukan terhadap Penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh Ke Depan

Pekan Kebudayaan Aceh atau PKA merupakan kegiatan yang sangat digemari bahkan sangat dinanti-nanti penyelenggaraannya oleh masyarakat Aceh karena dengan PKA masyarakat dapat menyaksikan bermacam-macam adat dan kebudayaannya. PKA juga telah menjadi sebuah pesta rakyat terbesar di Aceh sehingga anggaran yang dipersiapkan juga cukup besar dengan harapan agar PKA bisa terlaksana dengan baik dan dirasakan manfaatnya

oleh semua kalangan. Namun harapan dengan kenyataan dilapangan tidak selalu sesuai, begitu pula dengan PKA yang pada pelaksanaan terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi persiapan, saat kegiatan, dan pasca kegiatan itu sendiri. Oleh sebab itu setelah penulis menganalisa beberapa kekurangan tersebut maka juga diperlukan adanya kritik dan masukan guna memberikan solusi agar pelaksanaan PKA bisa lebih baik dan bermanfaat terutama dalam upaya untuk membangun Aceh melalui kebudayaan. Adapun masukan yang penulis rangkum diantaranya

1. Keseriusan dan komitmen Pemerintah Aceh sangat diperlukan dalam hal ini guna untuk mewujudkan kegiatan PKA sebagai sebuah wadah perlindungan, pembinaan, pemanfaatan, dan pengembangan seluruh kekayaan nilai-nilai sejarah, adat, dan budaya yang dimiliki Aceh.
2. PKA harus menjadi sarana pemersatu bagi berbagai etnis-etnis yang ada di Aceh sehingga melalui PKA ini khazanah kebudayaan yang dimiliki setiap etnis ini bisa saling membaur dan

dipertemukan agar terwujudnya semangat persatuan Aceh.

3. Pelaksanaan PKA harus banyak dan sering melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, budayawan, seniman, ulama, akademisi, tokoh politik, pakar ekonomi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan pihak yang terkait lainnya agar bersama duduk untuk membahas sehingga mencapai satu visi bersama yang diwujudkan dalam PKA.
4. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata haruslah membenahi manajemen pelaksanaan PKA yang sering tidak teratur. Hal ini harus diperbaiki guna mencapai tujuan mulia dari PKA itu sendiri yaitu sebagai wadah pelestarian kebudayaan Aceh.
5. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata haruslah lebih selektif dalam memilih EO. Pilihlah EO yang paham betul substansi sebuah kegiatan kebudayaan sehingga kegiatan yang terlaksana mempunyai nilai edukatif bagi masyarakat yang menyaksikan.
6. Pelaksanaan PKA harus benar-benar mampu mengakomodir

seluruh khazanah kebudayaan di Aceh sehingga PKA bisa menjadi edukasi bagi masyarakat untuk mengenali budaya asli mereka sebagai orang Aceh. Hal ini untuk menepis anggapan bahwa PKA hanya sekedar dijadikan proyek belaka yang mengatasnamakan event kebudayaan.

7. Dalam menghadapi era yang serba digital ini, PKA harus merespon hal itu dimana setiap kegiatan PKA harus diabadikan didalam tulisan untuk selanjutnya didigitalkan. Hal ini supaya setelah pelaksanaan PKA selesai ada satu bahan yang masih tersisa sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi siapapun yang membacanya
8. Pemerintah Aceh perlu membentuk satu badan permanen atau panitia khusus yang akan bertugas untuk menyiapkan konsep pelaksanaan PKA dengan persiapan yang lebih lama, intensif, dan selektif. Manfaat dari kebijakan ini adalah PKA langsung secara khusus difikirkan dan disiapkan oleh badan ini agar cita-cita mulia PKA tetap terlaksana 4 atau 5 tahun sekali. Hal ini juga berguna

agar PKA akan tetap bisa terealisasi meskipun terjadi pergantian kekuasaan ditingkat Provinsi.

Penutup

Pekan Kebudayaan Aceh atau PKA adalah sebuah kegiatan kebudayaan terbesar di Aceh. Kegiatan ini memiliki tujuan utama yaitu untuk membangun Aceh melalui pemajuan dan pengembangan kebudayaan. PKA pertama kali dilaksanakan pada tahun 1958 dengan tokoh sentral pelaksanaannya yaitu Gubernur Aceh Ali Hasjmy, ketua penguasa Perang/Panglima Komando Daerah Militer Aceh Letnan Kolonel Syamaun Gaharu, dan Kepala Staf KDMA Mayor T. Hamzah Bendahara. Kemudian T. Hamzah Bendahara mencetuskan ide untuk kembali melaksanakan PKA-2 pada pertemuan dengan pengurus Lembaga Pengembangan Seni Budaya (LPSB) dan sehingga PKA-2 terlaksana pada tahun 1972. Untuk edisi PKA-3 baru terlaksana setelah 16 tahun kedepan tepatnya pada tahun 1988 yang diprakarsai oleh DKA dan LAKA. PKA-4 dilaksanakan pada tahun 2004 yang untuk pertama kali pelaksanaan PKA menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk

konsisten dilaksanakan. Setelah itu pelaksanaan PKA relatif stabil yang dilaksanakan selama 5 tahun sekali yaitu PKA-5 pada tahun 2009, PKA-6 tahun 2013, dan PKA-7 di tahun 2018.

PKA telah memberikan manfaat yang besar bagi usaha untuk pelestarian kebudayaan di Aceh, dimana ia telah menjadi arena untuk perlindungan dan pengembangan nilai-nilai sejarah, adat, dan budaya di Aceh. Selain itu PKA juga berperan sebagai wadah pemulihan dan pemersatu masyarakat Aceh dari segala konflik dan perpecahan antar etnis yang pernah terjadi di Aceh. PKA secara langsung telah berhasil untuk mengeksposkan kembali khazanah kebudayaan Aceh yang sempat hilang sehingga bisa dinikmati kembali oleh generasi sekarang. Kemudian hasil yang paling monumental dari pelaksanaan PKA ialah dibangunnya kompleks yang khusus dibuat untuk pelaksanaan PKA yaitu Taman Ratu Safiatuddin serta kompleks taman ini dijadikan sebagai lokasi permanen pelaksanaan PKA.

Daftar Pustaka

Ahmad, Zakaria. 2008. *Sejarah Perlawanan Aceh Terhadap Kolonialisme Dan Imperialisme*. Banda Aceh: Yayasan PeNA.

Djamil, Muhammad Junus. 1959. *Gadjah Putih Iskandar Muda*. Kutaraja: Lembaga Kebudayaan Aceh.

Ibrahimy, Muhammad Nur. 1982. M. Daud Beureueh: Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh. Jakarta: Gunung Agung.

Ismail, Badruzzaman. 2012. *Sejarah Majelis Adat Aceh, Tahun 2003-2006*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.

Latief, Abdul. 2000. *Soeharto Terlibat G 30 S*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.

Putra, Rahmad Syah. 2018. *Aceh Barat Berbudaya Dokumentasi Pekan Kebudayaan (PKA) Ke-7 Kabupaten Aceh Barat*. Banda Aceh: Bandar Publishing.

Tim Penyusun Laporan PKA-7. 2018. *Laporan Pekan Kebudayaan Aceh 7*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Aceh.

Tim Penyusun Laporan PKA. 2013. *Laporan Pekan Kebudayaan Aceh Ke-6*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh.

Tim perumus laporan DISBUDPAR Aceh. 2004. *Laporan Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh Ke-4*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

Tim Perumus Laporan PKA-3. 1991. *PKA-3 Menjenguk Masa Lampau Menjangkau Masa Depan Kebudayaan Aceh*. Banda Aceh: Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Tim Perumus Laporan PKA DISBUDPAR Aceh. 2009. *Laporan Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh Ke-5*

PKA-5. Banda Aceh: Dinas
Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh.